



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : KPW PROVINSI KALIMANTAN UTARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HASIANDO GINSAR MANIK
2. Jabatan : KEPALA PERWAKILAN
3. NHK : 461321

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **8.255.000.000**

1. Tanah Seluas 510 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,
HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000
2. Tanah Seluas 556 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,
HASIL SENDIRI Rp. 875.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/28 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 27 m2/24 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 27 m2/25 m2 di KAB / KOTA
TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 40 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 164 m2/135 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **785.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKKAR Tahun 2016,
HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000



2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.
140.000.000
3. MOBIL, TOYOTA SIENTA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
155.000.000
4. MOBIL, TOYOTA RAIZE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
165.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.925.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	12.965.000.000
III. HUTANG	Rp.	2.000.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	10.965.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.